

ARIEF KAMALUDIN

LDII Masih Paradigma Lama

Lagi-lagi tentang LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia). Baru-baru ini mereka menyelenggarakan Rakernas (Rapat Kerja Nasional) di Jakarta. Hasilnya, sama saja. Mereka masih begitu-begitu saja.

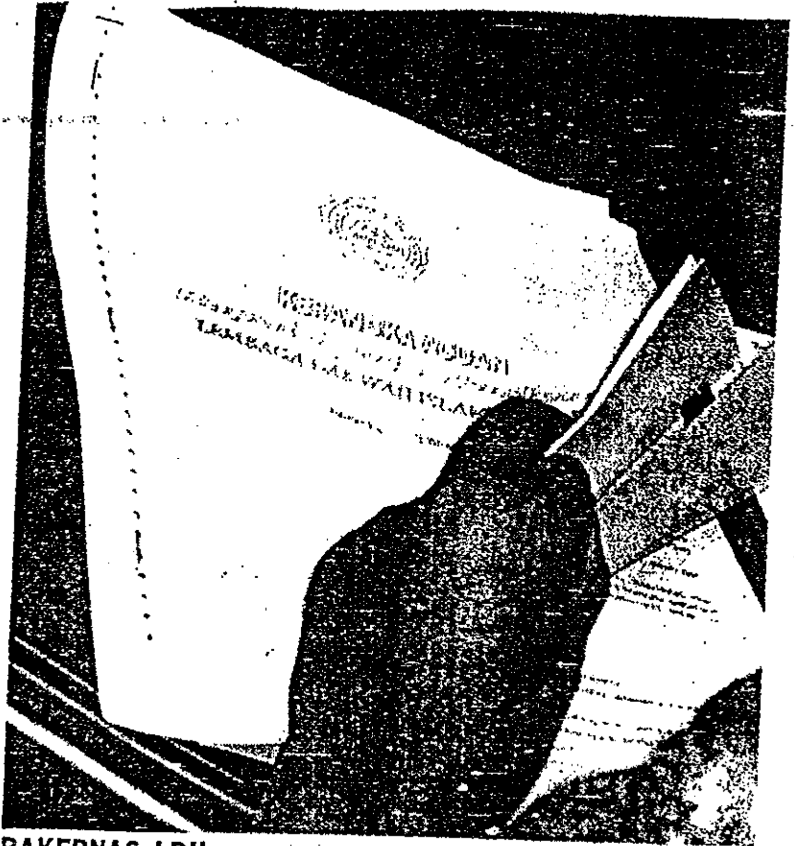
Di tengah maraknya suasana Rakernas, wacana tentang LDII menyeruak kembali. Tak bosan-bosannya, LPPI (Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam) mengingatkan umat Islam akan bahaya organisasi yang dulu bernama Islam Jamaah ini. Hal ini bukan tak beralasan mengingat paradigma baru yang akan diusung lembaga bikinan Nurhasan Ubaidah Lubis ini, ternyata hanya isapan jempol belaka. Akhir tahun 2006, mereka berjanji akan mengubah paradigma dan akan melakukan klarifikasi dengan MUI (Majelis Ulama Indonesia) dengan meninggalkan semua kesesatan. Tapi sampai kini masih tetap seperti dulu (Baca: *Sabili*, Edisi No.7 Th. XIV 19 Oktober 2006).

Dua hari menjelang Rakernas LDII, Senin (5/3), LPPI mengunjungi MUI Pusat dan menyerahkan bukti-bukti kesesatan dan kebohongan LDII yang terbaru. Buku baru terbitan LPPI itu berjudul *Kupas Tuntas Kesesatan dan Kebohongan LDII-Jawaban Atas Buku Direktori LDII.* Menurut Ketua LPPI M Amin Djamaluddin, penyerahan buku kepada MUI itu dilakukan sehubungan dengan diselenggarakannya Rakernas LDII pada tanggal 6-8 Maret 2007 di Balai Kartini, Jakarta.

Dalam penelitian LPPI, paham yang dianut oleh LDII tidak berbeda dengan aliran

Islam Jamaah atau Darul Hadits yang telah dilarang oleh Jaksa Agung Republik Indonesia pada tahun 1971 (SK Jaksa Agung RI No. Kep-089/ D.A/10/1971 tanggal 29 Oktober 1971). Keberadaan LDII, kata Amin, mempunyai akar kesejarahan dengan Darul Hadits atau Islam Jamaah yang didirikan pada tahun 1951 oleh Nurhasan Ubaidah Lubis (Madigol). Setelah dilarang tahun 1971, aliran tersebut kemudian berganti nama menjadi LEMKARI (Lembaga Karyawan Islam) pada tahun 1972.

Guna menjernihkan kasus LDII ini, LPPI meminta MUI agar memprakarsai pertemuan antara LPPI sebagai penulis dan penerbit buku, dengan pihak LDII dalam rangka memperdebatkan materi-materi ajaran LDII. "Kami harap debat itu diadakan sesegera mungkin dengan disaksikan oleh para pengurus MUI Pusat dan dihadiri oleh para wartawan, baik media cetak maupun elektronik," kata Amin.



ARIEF KAMALUDIN

RAKERNAS LDII

Menunggu eksekusi pemerintah?

Beberapa kesesatan LDII dalam buku terbaru itu, antara lain: *pertama*, hasil Munas (Musyawarah Nasional MUI VII di Jakarta tahun 2005 lalu yang menyebut LDII sebagai ajaran sesat dan pendangkalan akidah. Dalam Munas itu, MUI mendesak pemerintah untuk bertindak tegas terhadap munculnya berbagai ajaran sesat yang menyimpang dari ajaran Islam dan membubarkannya, karena sangat meresahkan masyarakat.

Kedua, LDII menganggap kafir orang di luar jamaah mereka. Dalam makalah LDII berjudul "Pentingnya Pembinaan Generasi Muda Jamaah" dengan kode H/97, halaman 8) tertulis, "Dan dalam nasehat supaya ditekankan bahwa bagaimanapun juga cantiknya dan gantengnya orang-orang di luar jamaah, mereka itu adalah orang kafir; musuh Allah, musuh orang iman, calon ahli neraka yang tidak boleh dikasihi."

Ketiga, jamaah LDII dilarang menikah dengan orang luar jamaah mereka karena dianggap najis. Hal ini terungkap dalam surat 21 orang keluarga R. Didi Gamadi dari Cimahi, Bandung. Keluarga Gamadi yang sadar dan insyaf akhirnya mencabut bai'at mereka terhadap LDII, Oktober 1999 lalu. Surat ini ditujukan kepada DPP LDII, Imam Amirul Mukminin Pusat dan pimpinan cabang LDII Cimahi, Bandung.

Keempat, kejahatan onani, homoseks dan aborsi bisa ditebus dengan uang untuk sang Imam. Onani misalnya, dendanya amal shalih di pusat selama satu bulan atau uang Rp 2.000 per hari sehingga berjumlah Rp 60.000. Homoseks, dendanya amal shalih di pusat selama tiga bulan atau

uang Rp 2.000 per hari (total Rp 180.000 sebulan). Untuk aborsi, dendanya amal shalih di pusat selama enam bulan atau uang Rp 2.000 per hari hingga berjumlah Rp 360.000. Hal ini dijelaskan dalam "Kumpulan Penjelasan Peraturan Agama", materi pengajian bulanan LDII, 16 September 2006 dalam bab 20 tentang *kafarah.*

"Peraturan agama yang dibuat oleh LDII itu secara jelas menyatakan bahwa perbuatan bejat seperti onani, homo dan aborsi dijadikan proyek pusat organisasi LDII untuk memperoleh uang," ujar Amin.

Kelima, LDII menganggap shalat orang Muslim selain mereka, tidak sah. Biasanya, orang LDII tidak mau menjadi makmum kepada selain golongannya, sehingga mereka membangun masjid sendiri.

Selain itu, masih banyak lagi kesesatan-kesesatan yang dilakukan LDII. Karena itu, masih kata Amin, LDII tidak bisa mengelak dengan dalih apapun bahwa mereka telah berubah. "Pengakuan bahwa LDII sekarang sudah memakai paradigma baru, lain dengan yang lama itu dusta alias bohong!"

Ketua MUI, KH Cholil Ridwan, meminta umat Islam waspada, karena selama ini LDII masih bermasalah. "Kedatangan para petinggi LDII ke kantor MUI Pusat untuk mohon klarifikasi dan minta disejajarkan dengan ormas-ormas Islam lain, telah menjadi bukti nyata bahwa LDII memang bermasalah," kata Cholil.

MUI Pusat sampai saat ini belum memberikan klarifikasi apapun, tapi masih berupa tahap menerima masukan dari LDII sendiri. MUI juga masih menerima masukan dari masyarakat, terutama dari MUI daerah. Cholil juga menyarankan agar pejabat negara dan masyarakat Indonesia membaca buku *Akar Kesesatan LDII dan Penipuan Triliunan Rupiah* karangan H.M.C. Shodiq dan buku *Kupas Tuntas*-nya... M. Amin Djamaluddin, sebagaimana yang diserahkan ke MUI Pusat itu.

Kiai Cholil juga mengimbau para jamaah LDII agar mau bertaubat *nasuha* secara sendiri-sendiri . kemudian membaur dengan kaum Muslimin termasuk dengan Ustadz Bambang Irawan Hafiluddin, mantan gembong LDII yang sudah bertaubat.

Ketua DPD LDII Bekasi, H. Muhammad Nurhadi tidak mempermasalahkan pengaduan LPPI ke MUI. "Yang jelas, LDII bukanlah lembaga yang membuat orang menjadi korban. Kita hanyalah lembaga dakwah yang mengajak orang untuk bisa mendalami kegiatan-kegiatan agama, mengajar amar makruf nahi mungkar," ujarnya.

Tentang kesesatan-kesesatan LDII yang dikupas dalam buku karangan Shodiq dan Amin Djamaluddin tersebut, Nurhadi menganggapnya hanyalah materi masa lalu yang terus diputar ulang. "Kita ini bukan Islam Jamaah, tapi organisasi resmi. Buku-buku tersebut, materinya tidak terkait dengan masalah sekarang ini," katanya.

Ketua MUI Pusat, H. Nazri Adlani, menyatakan, LDII memang masih belum melakukan klarifikasi bahwa mereka sudah berubah dan menggunakan paradigma baru. "MUI masih mempertimbangkan klarifikasi mereka, karena berdasarkan laporan-laporan dari daerah, mereka masih memakai paradigma lama."

Menurut Nazri, MUI tidak akan menerima klarifikasi LDII, sebelum mereka melakukan pertaubatan dan pembuktian bahwa mereka tidak lagi menggunakan paradigma lama. LDII Pusat hingga daerah harus melakukan klarifikasi, baik pada tingkat MUI Pusat maupun daerah. "Ini bukan masalah sederhana, ini masalah akidah!" tegasnya.

Nazri juga menyayangkan ketidakberanian pemerintah membubarkan LDII, walau telah jelas-jelas menyimpang. "MUI tidak punya kekuatan apa-apa, yang punya kekuatan adalah pemerintah. Kita hanya mengeluarkan fatwa, masalah eksekusi urusan pemerintah," ujarnya.

Ternyata, LDII masih memakai paradigma lama. Kenapa pemerintah diam saja?

Chairul Akhmad

Laporan: Diyah Kusumawardhani



ARIEF KAMALUDIN

Klarifikasi LDII Tak Kunjung Tuntas

Rakernas Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) telah usai. Proses klarifikasi menuju paradigma baru masih ditunggu. Seriuskah?

Rakernas LDII, Selasa-Kamis (6-8/3) yang berlangsung di Jakarta usai sudah. Pejabat negara, tokoh ormas Islam dari Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah turut hadir. Acara yang dibuka Menko Kesra Aburizal Bakrie ini juga dihadiri Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ma'ruf Amin.

Kedatangan Kiai Ma'ruf disayangkan sejumlah pihak yang menganggap LDII masih berpegang pada ajaran lama yaitu, Islam Jamaah. Apalagi, sampai kini belum ada klarifikasi dari LDII bahwa mereka telah meninggalkan kesesatannya. "Saya hadir dalam Rakernas LDII atas nama pribadi, tidak mengatasnamakan MUI. Anggota MUI lainnya tidak mempermasalahkan kehadiran saya," tegas Ma'ruf.

Meski begitu, berita miring tetap santer berhembus. Ini memaksa MUI mengeluarkan surat tanggapan bernomor U-97/MUI/III/2007. Surat yang ditandatangani Sekretaris Dewan Pimpinan MUI H Am-

rullah Ahmad dan Ketua MUI KH A Cholil Ridwan ini berisi tiga hal. *Pertama*, MUI secara resmi tidak mengirim utusan untuk menghadiri Rakernas LDII. *Kedua*, MUI belum mengambil keputusan apapun tentang status LDII. *Ketiga*, semua berita yang menyebut keterlibatan MUI menjadi di luar tanggung jawab MUI.

Dalam rakernas, Ketua Umum LDII KH Abdullah Syam menyatakan, organisasi yang dipimpinnya bukan reinkarnasi (penjelmaan) atau penerus organisasi Islam Jamaah dan ajarannya. "LDII bukan Islam Jamaah apalagi penerus ajarannya," tegasnya sebagaimana dikutip *republika.co.id.*

Menurut Abdullah Syam, LDII justru berupaya melakukan pembinaan terhadap orang-orang yang dulu menganut paham Islam Jamaah. "LDII juga terus melakukan pendekatan dan klarifikasi mulai dari tingkat bawah. Ini kami lakukan sesuai permintaan MUI," katanya.

Memang, Ketua Komisi Fatwa MUI KH Ma'ruf Amin meminta agar LDII melakukan klarifikasi dari bawah dan meyakinkan masyarakat bahwa ajarannya tidak sesat. Ma'ruf juga mengaku, telah menerima pimpinan LDII dan mendengar penjelasan dari mereka bahwa LDII tidak menganut paham Islam Jamaah.

Secara pribadi, Ma'ruf menyambut baik kembalinya LDII bergabung dengan MUI dan ormas Islam lain. "Masa orang mau baik tidak boleh. Memangnya kita yang membuka pintu surga," katanya. Tapi, lanjut Ma'ruf, sampai kini MUI belum mengeluarkan fatwa mengenai LDII, karena masih dalam proses.

Menurut Ketua Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam (LPPI) M Amin Djamaluddin, LDII masih berparadigma lama. Amin tak percaya dengan klarifikasi LDII. "Mereka pembohong, bagaimana mau dipercaya? Mereka telah berbohong turun-temurun. Mereka hidup dalam kebohongan selama dua puluh tahun lebih. Susah dipegang omongannya," katanya. Amin juga menyebutkan, masih banyak daerah yang belum melakukan klarifikasi pada MUI setempat.

Ma'ruf Amin juga mengakui, di beberapa daerah masih terdapat kejanggalan di tubuh LDII. Tapi, tambah Ma'ruf, masyarakat harus memahami bahwa berubah, tidak seperti membalik telapak tangan. "Saya tak ada komitmen apapun dengan mereka, hanya mendorong agar mereka mempercepat klarifikasi. Itu saja," tegasnya.

Depkom Info DPP LDII Joko Hariyanto menegaskan, LDII berbeda dengan Islam Jamaah. Dia juga meminta agar *Sabili* membantu membersihkan ajaran Islam Jamaah di LDII. "Jangan langsung dipojokkan seperti ini," katanya.

Menurut Joko, klarifikasi LDII masih dalam proses. Beberapa daerah memang ada yang belum melakukan klarifikasi karena terjadinya peralihan dan pergantian pengurus MUI di daerah itu. "Kita ingin secepatnya malakukan klarifikasi, agar semuanya selesai. Kita juga tidak lagi memakai doktrin lama. Untuk jelasnya, silakan hubungi Ketua Umum LDII KH Abdullah Syam," sarannya.

Sayang, Abdullah Syam tidak bisa dikonfirmasi. Ketika *Sabili* menghubunginya via telpon, yang bersangkutan dalam keadaan sakit. "Maaf saya tidak bisa melayani wawancara Anda, karena sedang sakit. Mungkin lain kali," ujarnya.

MUI memang tidak menetapkan batas waktu terakhir bagi LDII untuk melakukan klarifikasi. Sepanjang mereka belum klarifikasi di tingkat bawah, kota dan kabupaten, MUI belum bisa mengambil keputusan. Menurut Ma'ruf Amin, MUI hanya menunggu hasil klarifikasi LDII di daerah-daerah. "Setelah LDII melakukan klarifikasi pada MUI daerah, barulah MUI pusat mengambil kesimpulan akhir. Selama itu belum, ya belum," tandas Ma'ruf Amin.

Kini, semuanya berpulang pada LDII sendiri: mau benar-benar bertaubat atau tidak. Otoritas hukum dan fatwa di negeri telah membuka pintunya.■

Chairul Akhmad